|  |
| --- |
| logo UEU kecil |
| **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP 2016/2017** |
| **PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM** |
| **UNIVERSITAS ESA UNGGUL** |
|  |
| **Mata kuliah** | **:** | HUKUM KEPAILITAN  | **Kode MK** | **:** | HBI521 |
| **Mata kuliah prasyarat** | **:** | - | **Bobot MK** | **:** | 2 SKS |
| **Dosen Pengampu** | **:** | SRI REDJEKI SLAMET, SH, MH | **Kode Dosen** | **:** | 6529 |
| **Alokasi Waktu** | **:** |  Tatap muka 14 x 100 menit, tidak ada praktik, tidak ada online |
| **Capaian Pembelajaran** | **:** | 1. Mahasiswa mampu memahami dan mendalami bahwa kepailitan dan PKPU merupakan salah satu penyelesaian sengketa utang yang penyelesaiannya melalui lembaga Pengadilan Niaga.
2. Mahasiswa mampu memahami hakekat daripada kepailitan merupakan penyelesaian sengketa utang dengan penyitaan umum atas harta kekayaan debitor yang menjadi jaminan pembayaran utang kepada para kreditornya.
3. Mahasiswa mampu memahami konsep kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU.
4. Mahasiswa mampu memahami tata cara permohonan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta prosesnya persidangan dan pemberesannya.
 |
|  |  |  |
| **SESI** | **KEMAMPUAN****AKHIR** | **MATERI** **PEMBELAJARAN** | **BENTUK PEMBELAJARAN**  | **SUMBER** **PEMBELAJARAN** | **INDIKATOR****PENILAIAN** |
| 1 | Mahasiswa diharap-kan dapat memahami mengenai pengertian kepailitan, perkem-bangan kepailitan di Indonesia dan kete-tuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku  | Pengantar :1. perkenalan dengan Do-sen pengasuh
2. Pengenalan tentang metode pembelajaran yang akan diberlaku-kan
3. Penyampaian peraturan perundang-undangan yang wajib dibawa setiap perku-liahan (UU No. 37 Tahunn 2004 dan KUH Perdata)
4. Pembagian kelompok tugas ke Pengadilan Niaga untuk mengikuti persidangan Kepailitan atau PKPU
5. Memberikan pengantar mengenai :
6. Pengertian Kepai-litan.
7. Perkembangan Hu-kum Kepailitan
8. Peraturan Perun-dangan yang berlaku dan perbandingan antara beberapa peraturan perun-dangan yang lama dan yang baru
9. Hukum Formil atau Hukum Acara yang berlaku
 | 1. Ceramah dan dis-kusi.
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media: kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web*
 | 1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
2. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Pengesahan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU.
3. Faillisement Verordening (Undang-Undang tentang Kepailitan), Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 jo. Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348.
4. Hukum Kepailitan, ka-rangan Munir Fuady.
5. Undang Undang Kepai-litan di Indonesia (terje-mahan), karangan Jerry Hoff.
6. Penyelesaian Utang Piu-tang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor : Rudhy. A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto.
7. Seri Hukum Bisnis : Ke-pailitan, karangan Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya.
 | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan secara umum mengenai kepailitan dan per-aturan perundang-an yang berlaku.  |
| 2 | Mahasiswa diharap-kan dapat memiliki pengetahuan menge-nai Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang mempunyai yurisdiksi mengadili perkara kepailitan dan PKPU. | Pengadilan Niaga :1. Pengertian Pengadilan dan Pengadilan Niaga.
2. Konsep Dasar Kebera-daan Pengadilan Niaga
3. Pembentukan Penga-dilan Niaga.
4. Pengorganisasian Pe-ngadilan Niaga.
5. Pembagian Kewenang-an Mengadili : Kewe-nangan Absolut dan kewenangan Relatif serta Yurisdiksi Penga-dilan Niaga.
6. Kewenangan Penga-dilan Niaga terhadap Arbitrase.
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media: kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web*
 | 1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
2. UU No. 4 Tahun 1998 tentang Pengesahan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU.
3. Hukum Kepailitan, ka-rangan Munir Fuady.
4. Undang Undang Kepai-litan di Indonesia (terje-mahan), karangan Jerry Hoff.
5. Penyelesaian Utang Piu-tang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor : Rudhy. A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto.
6. Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, karangan Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya.
 | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai Pengadilan Niaga dan Kewenangan Mengadili dari Pe-ngadilan Niaga baik secara absolut maupun relatif. |
| 3 | Mahasiswa diharap-kan mampu memaha-mi mengenai prinsip, syarat dan pihak dalam permohonan kepailitan  | Prinsip, Syarat, dan Pihak Dalam Kepailitan1. Prinsip Kepailitan
2. Syarat-syarat pernyataan pailit
3. Pengertian Utang
4. Pemohon pailit
5. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan un-dang-undang
3. Media: kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web*
 | 1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Kepailitan, ka-rangan Munir Fuady
4. Undang Undang Kepaili-tan di Indonesia (terje-mahan), karangan Jerry Hoff.
5. Penyelesaian Utang Piu-tang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Editor : Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto.
6. Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, karangan Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya.
 | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan prinsip dasar kepailitan dan syarat penga-juan permohonan pailit serta pihak yang dapat menga-jukan permohonan pailit.  |
| 4 | Mahasiswa diharap-kan dapat memahami mengenai akibat dari kepailitan, Kurator, Hakim Pengawas, Panitia Kreditor dan Actio Pauliana  | Akibat Kepailitan, Kurator, Hakim Pengawas, Panitia Kreditor & Actio Pauliana :1. Akibat kepailitan : akibat terhadap debitor dan akibat terhadap kreditor serta akibat kepailitan terhadap transaksi
2. *Zero hour principle*
3. Aspek hukum Kurator
4. Hakim Pengawas
5. Panitia Kreditor
6. Actio Pauliana : syarat, tata cara dan akibat pembatalan melalui proses actio pauliana

  | 1. Ceramah dan dis-kusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media: kelas, kompu-ter, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Kepailitan, ka-rangan Munir Fuady
4. Undang Undang Kepai-litan di Indonesia (terje-mahan), karangan Jerry Hoff.
5. Penyelesaian Utang Piu-tang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor : Rudhy. A Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto
6. Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, karangan Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya.
 | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan : 1. apa saja akibat dari pernyatan pailit
2. kedudukan dan peran Kurator dan Hakim Pe-ngawas serta Panitia Kreditor dalam proses kepailitan.
3. lembaga actio pauliana sebagai lembaga pem-batalan tran-saksi yang me-rugikan yang di-lakukan debitor sebelum dinya-takan pailit
 |
| 5 | Mahasiswa diharap-kan dapat memahami dan mengerti menge-nai proses kepailitan | Proses Kepailitan :1. Kewenangan mengadili
2. Domisili hukum
3. Permohonan kepai-litan
4. Prosedur pengajuan permohonan kepailitan
5. Pendaftaran permo-honan kepailitan
6. Proses pemeriksaan kepailitan :
7. Tahap persidangan
8. Pemanggilan para pihak
9. Putusan pailit
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media: kelas, kom-puter, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Kepailitan, ka-rangan Munir Fuady
4. Undang Undang Kepai-litan di Indonesia (terje-mahan), karangan Jerry Hoff.
5. Penyelesaian Utang Piu-tang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor : Rudhy. A Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto
6. Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, karangan Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya.
 | Kemampuan mengajukan permohonan kepailitan serta kemampuan memahami proses permohonan pailit |
| 6. | Mahasiswa diharap-kan dapat mengerti, dan memahami me-ngenai upaya hukum yang mencakup jenis upaya hukum dalam kepailitan serta proses upaya hukum tersebut  | Upaya Hukum :1. Upaya hukum dalam kepailitan
2. Upaya hukum terha-dap perdamaian dalam kepailitan
3. Kasasi : Proses, Hukum acara, dan intervensi pada proses kasasi
4. Peninjauan Kembali : Proses peninjauan kembali
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Kepailitan, ka-rangan Munir Fuady
4. Undang Undang Kepai-litan di Indonesia (terje-mahan), karangan Jerry Hoff.
5. Penyelesaian Utang Piu-tang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor : Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto
6. Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, karangan Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya.
 | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai upaya hukum dalam kepailitan serta prosesnya |
| 7. | Mahasiswa diharap-kan dapat memahami mengenai keadaan insolvensi dan pem-beresan harta debitor  | Insolvensi dan Pembe-resan :1. Pengajuan tagihan kreditor.
2. Verifikasi utang/ pen-cocokan utang
3. Piutang dan ketentuan pokok dalam menen-tukan jumlah piutang
4. Ketentuan batas akhir pengajuan tagihan ser-ta akibat hukumnya
5. Tugas Kurator dalam pencocokan piutang
6. Urutan pembayaran atas piutang
7. Pengajuan piutang oleh kreditor asing
8. Perjumpaan utang (*set-off*)
9. Insolvensi
10. Likuidasi dan pembe-resan harta pailit
 | 1. Ceramah dan dis-kusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media : kelas, kompu-ter, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Kepailitan, ka-rangan Munir Fuady
4. Undang Undang Kepai-litan di Indonesia (ter-jemahan), karangan Jerry Hoff.
5. Penyelesaian Utang Piu-tang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor : Rudhy. A Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto
6. Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, karangan Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya.
 |  Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai keadaan insolveni debitor dan proses pencocokan utang serta proses pem-beresan. |
| 8 | Mahasiswa diharap-kan dapat mengerti dan memahami per-damaian dalam proses kepailitan  | Perdamaian dalam kepai-litan :1. Pengertian dan maksud perdamaian
2. Isi rencana perdamaian
3. Cara mengajukan dan membicarakan serta memutuskan rencana perdamaian
4. Kreditor yang berhak mengeluarkan suara
5. Rencana perdamaian yang diterima dalam rapat kreditor
6. Homologasi dan Kekua-tan perdamaian yang dihomologasi serta akibat hukumnya
7. Pembatalan perda-maian

  | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media : kelas, kompu-ter, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Kepailitan, ka-rangan Munir Fuady
4. Undang Undang Kepai-litan di Indonesia (terje-mahan), karangan Jerry Hoff.
5. Penyelesaian Utang Piu-tang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor : Rudhy. A Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto
6. Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, karangan Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya.
 | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengeni perdamaian dalam kepailitan serta prosesnya  |
| 9 | Mahasiswa diharap-kan dapat mengerti mengenai kepailitan terhadap harta pe-ninggalan  | Kepailitan terhadap harta peninggalan :1. Pengertian kepailitan terhaadap harta pe-ninggalan
2. Kewarisan dan kepai-litan
3. Pengajuan kepailitan terhadap harta pening-galan
4. Perdamaian dalam kepailitan harta peninggalan
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap ma-teri dengan undang-undang
3. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Kepailitan, ka-rangan Munir Fuady
4. Undang Undang Kepai-litan di Indonesia (ter-jemahan), karangan Jerry Hoff.
5. Penyelesaian Utang Piu-tang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor : Rudhy. A Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto
6. Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, karangan Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya.
 | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai kepailitan terhadap harta peninggalan dan proses penga-juannya |
| 10. | Mahasiswa diharap-kan dapat memahami mengenai pengertian dan konsep Penun-daan Kewajiban Pem-bayaran Utang (PKPU)  | Pengantar PKPU :1. Pengertian PKPU
2. Perbedaan kepailitan dan PKPU
3. Sejarah PKPU
4. Permohonan PKPU
5. Alasan pengajuan PKPU
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media : kelas, komputer, *LCD, whiteboard, web*
 | 1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Kepailitan, ka-rangan Munir Fuady
4. Undang Undang Kepai-litan di Indonesia (ter-jemahan), karangan Jerry Hoff.
5. Penyelesaian Utang Piu-tang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor : Rudhy. A Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto
6. Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, karangan Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya.
 |  Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai konsep dan pe-ngertian PKPU |
| 11 | Mahasiswa diharap-kan dapat memahami mengenai akibat hukum dari PKPU serta kedudukan dan peran pengurus dan Hakim Pengawas | Akibat PKPU, Hakim Pengawas dan Pengurus:1. Akibat PKPU
2. Pihak yang berperan dalam proses PKPU
3. Peran dan tanggung jawab Hakim Penga-was dan Pengurus dalam PKPU
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media : kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web*
 | 1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Kepailitan, ka-rangan Munir Fuady
4. Undang Undang Kepai-litan di Indonesia (ter-jemahan), karangan Jerry Hoff.
5. Penyelesaian Utang Piu-tang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor : Rudhy. A Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto
6. Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, karangan Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya.
 | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai akibat hukum dari PKPU dan kedudu-kan serta peran Pengurus dan Hakim Pengawas |
| 12 |  Mahasiswa diharap-kan dapat memahami mengenai prosedur pengajuan permoho-nan PKPU dan dan pemeriksaan PKPU | Prosedur Permohonan PKPU :1. Pengajuan Permohon-an PKPU
2. Pemeriksaan persi-dangan dan hukum acara yang berlaku
3. Putusan PKPU
4. PKPU tetap dan PKPU Sementara
5. Rapat Kreditor
6. Verifikasi piutang
7. Debitor pailit dan proses kepailitan sete-lah PKPU
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media : kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web*
 | 1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Kepailitan, ka-rangan Munir Fuady
4. Undang Undang Kepai-litan di Indonesia (ter-jemahan), karangan Jerry Hoff.
5. Penyelesaian Utang Piu-tang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor : Rudhy. A Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto
6. Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, karangan Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya.
 | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai prosedur penga-juan dan pemerik-saan permohonan PKPU |
| 13 | Mahasiswa diharap-kan dapat memahami mengenai perdamaian dalam PKPU | Perdamaian dalam PKPU :1. Pengertian perdamaian
2. Tata cara pengajuan rencana perdamaian
3. Pengajuan tagihan para kreditor
4. Proses pembahasan rencana perdamaian
5. Pengesahan rencana perdamaian
 | 1. Ceramah dan diskusi
2. Pembahasan tiap materi dengan undang-undang
3. Media : kelas, kom-puter, *LCD, White-board, web*
 | 1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. Hukum Kepailitan, ka-rangan Munir Fuady
4. Undang Undang Kepai-litan di Indonesia (ter-jemahan), karangan Jerry Hoff.
5. Penyelesaian Utang Piu-tang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Editor : Rudhy. A Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto
6. Seri Hukum Bisnis : Kepailitan, karangan Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya.
 | Kemampuan me-mahami dan men-jelaskan mengenai pengajuan rencana perdamaian, tata cara dan proses pembahasannya serta pengesahan-nya. |
| 14 | Mahasiswa mampu memaparkan semua hasil pembelajaran pertemuan 1 s/d 13 dan melakukan analisis Pembanding antara teori dalam pemelajaran dengan mengaplikasikan dalam praktek pera-dilan di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan maupun PKPU | Presentasi Laporan hasil mengikuti persidangan kunjungan ke Pengadilan Negeri | Presentasi dan Tanya jawab | Laporan persidangan  | Kemampuan Meng-uraikan kasus yang diikuti dalam persi-dangannya dan ja-lannya persidangan nan dikaitkan de-ngan teori kepai-litan dan PKPU yang diperoleh dalam pembela-jaran. |

 Jakarta, 5 April 2017

Mengetahui,

Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,



**NURHAYANI, SH, MH SRI REDJEKI SLAMET, SH, MH**

**EVALUASI PEMBELAJARAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SESI** | **PROSEDUR** | **BENTUK** | **SEKOR > 77** **( A / A-)** | **SEKOR > 65****(B- / B / B+ )** | **SEKOR > 60****(C / C+ )** | **SEKOR > 45****( D )** | **SEKOR < 45****( E )** | **BOBOT** |
| 1 | *Progess test* | lisan | Menguraikan pe-ngertian kepaili-tan, konsep kepai-litan dan pera-turan perundang- undangan yang berlaku serta per-bandingannya de-ngan peraturan pundang-unda-ngan yang lama secara lengkap dan benar  | Menguraikan pe-ngertian kepaili-tan, konsep kepai-litan dan pera-turan perundang- undangan yang berlaku secara benar  | Menguraikan konsep kepai-litan dan pera-turan perun-dang-undang secara benar  | Menguraikan pengertian konsep kepai-litan dan pera-turan perun-dang- undang tetapi kurang tepat  | Tidak dapat Menguraikan pengertian kepailitan dan peraturan perundang- undang | 0 |
| 2 | *Progess test* | lisan | Menguraikan pe-ngertian pengadil-an niaga, konsep keberadaan dan pembentukan pe-ngadilan Niaga secara lengkap dan benar  | Menguraikan pe-ngertian pengadil-an niaga dan kon-sep keberadaan Pengadilan Niaga secara benar | Menguraikan konsep kebera-daan pengadilan niaga secara benar | Menguraikan konsep kebera-daan penga-dilan niaga kurang tepat | Tidak dapat menguraikan konsep kebe-radaan penga-dilan niaga | 0 |
| 3 | *Progess test* | Lisan | Menguraikan Prinsip kepailitan, syarat permo-honan pailit, dan pihak dalam per-mohonan kepai-litan secara lengkap dan benar | Menguraikan Prinsip kepailitan, syarat permohon-an pailit, dan pihak dalam permohonan kepailitan secara benar | Menguraikan Prinsip kepaili-tan dan pihak dalam permo-honan kepailitan secara benar | Menguraikan Prinsip kepai-litan dan pihak dalam permohonan kepailitan kurang tepat  | Tidak dapat menguraikan Prinsip kepai-litan dan pihak dalam permohonan kepailitan | 0 |
| 4 | *Past test* | Perbuatan | Memberikan uraian lengkap dan benar dalam bentuk tertulis dari hasil penelusuran literatur di perpustakaan mengenai akibat-akibat kepailitan, tugas kurator dan Hakim Pengawas | Memberikan uraian dengan benar dan lengkap dalam bentuk tertulis dari hasil penelusuran literatur di perpustakaan mengenai akibat-akibat kepailitan  | Memberikan uraian dalam bentuk tertulis dari hasil penelusuran literatur di perpustakaan mengenai akibat-akibat kepailitan, secara benar  | Memberikan uraian dalam bentuk tertulis dari hasil penelusuran literatur di perpustakaan mengenai akibat-akibat kepailitan, secara tidak tepat | Tidak mem-buat penelu-suran literatur di perpustakaan, sehingga ti-dak memberi-kan uraian dalam bentuk tertulis mengenai akibat-akibat kepailitan | 5 % |
| 5 | *Past test*  | Perbuatan  | Membuat lengkap dan benar surat kuasa dan surat permohonan pernyataan pailit | Membuat dengan benar dan lengkap surat permohonan pailit  | Membuat surat permohonan pailit dengan benar tapi kurang lengkap  | Membuat surat permohonan pailit lengkap  | Tidak membuat surat kuasa maupun surat permohonan pailit  | 5 % |
| 6 | *Pree test* | Lisan  | Memberikan uraian tata cara pengajuan permo-honan pailit dan proses serta pro-sedur pemerik-saan permohonan pailit secara leng-kap dan benar | Memberikan urai-an secara benar dan lengkap pro-ses serta prosedur pemeriksaan per-mohonan pailit | Memberikan uraian proses serta prosedur pemeriksaan permohonan pailit secara benar namun kurang lengkap | Memberikan uraian proses serta prosedur pemeriksaan permohonan pailit tetapi tidak tepat | Tidak dapat menguraikan proses serta prosedur pemeriksaan permohonan pailit  | 0 |
| 7 | *Pree test* | Lisan  | Menguraikan me-ngenai upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit, macam upaya hukum serta proses dalam upaya hukum tersebut baik kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan benar | Menguraikan me-ngenai macam upaya hukum dan proses dalam upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali secara lengkap dan benar  | Menguraikan me-ngenai macam upaya hukum dan proses dalam upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali secara benar  | Menguraikan mengenai proses dalam upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali tetapi tidak lengkap  | Tidak dapat Menguraikan proses dalam upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali |  |
| 8 | *Past test* | Tertu-lis (UTS) | Menguraikan de-ngan benar, tepat dan lengkap test essay dengan ka-jian undang-undang materi 1 s/d 7 | Menguraikan dengan benar dan tepat test essay dengan kajian undang-undang materi 1 s/d 7  | Menguraikan dengan benar dan test essay dengan kajian undang-undang materi 1 s/d 7  | Menguraikan dengan test essay dengan kajian undang-undang materi 1 s/d 7 tetapi tidak tepat  |  Tidak dapat enguraikan test essay dengan kajian undang-un-dang materi 1 s/d 7  | 25 % |
| 9 | *Progess test* | Lisan  | Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim secara benar aktif  | Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim secara benar  | Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim secara benar tapi kurang aktif | Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim tetapi tidak tepat  | Tidak dapat Menguraikan pembuktian dan alat bukti serta putusan hakim  |  |
| 10 | *Progess test* | Lisan  | Menguraikan mengenai banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara benar dan lengkap | Menguraikan mengenai banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara benar | Menguraikan mengenai banding, kasasi, dan peninjauan kembali benar | Menguraikan mengenai banding, kasasi, dan peninjauan kembali tidak tepat  | Tidak dapat menguraikan mengenai banding, kasasi, dan peninjauan kembali  | 0 |
| 11 | *Progress test*  | Lisan  | Menguraikan mengenai insolvensi, pengajuan piutang, verifikasi utang dan pemberesan harta pailit dengan benar lengkap | Menguraikan mengenai insolvensi, pengajuan piutang dan pemberesan harta pailit dengan benar dan lengkap | Menguraikan mengenai insolvensi, pengajuan piutang, dan pemberesan harta pailit dengan benar | Menguraikan mengenai insolvensi, dan pemberesan harta pailit tetapi tidak tepat  | Tidak dapat menguraikan mengenai insolvensi, dan pemberesan harta pailit | 0 |
| 12 | *Progress tesr* | Lisan  | Menguraikan mengenai PKPU, proses dan prosedur PKPU serta tugas dan kedudukan Pengurus dan Hakim Pengawas dengan benar dan lengkap  | Menguraikan mengenai PKPU, proses dan prosedur PKPU serta tugas dan kedudukan Pengurus dan Hakim Pengawas dengan benar | Menguraikan mengenai PKPU, proses dan prosedur PKPU dengan benar | Menguraikan mengenai PKPU, proses dan prosedur PKPU tetapi tidak tepat | Tidak dapat Menguraikan mengenai PKPU, proses dan prosedur PKPU  | 0 |
| 13 | *Past test* | Tertu-lis (UAS) | Menguraikan dengan benar, tepat dan lengkap test essay dengan kajian undang-undang materi 8 s/d 13 | Menguraikan dengan benar dan tepat test essay dengan kajian undang-undang materi 8 s/d 13  | Menguraikan dengan benar dan test essay dengan kajian undang-undang materi 8 s/d 13  | Menguraikan dengan test essay dengan kajian undang-undang materi 8 s/d 13 teta-pi tidak tepat  |  Tidak dapat menguraikan test essay dengan kajian undang-un-dang materi 8 s/d 13  | 35% |
| 14 | *Past Test* | Presentasi  | Membuat dan mempresetasikan hasil laporan mengikuti persidangan secara lengkap dan benar dan mampu mempertahan-kan | Membuat dan mempresetasikan hasil laporan mengikuti per-sidangan secara benar dan mam-pu mempertahan-kan | Membuat dan mempresetasi-kan hasil lapor-an mengikuti persidangan secara benar dan kurang mampu mempertahan-kan | Membuat dan mempresetasikan hasil lapor-an mengikuti persidang-an tidak benar dan tidak mam-pu memperta-hankan | Tidak membuat laporan  | 20 % |

**Komponen penilaian :**

Absensi : 10 %

Tugas individual : 10 %

Tugas kelompok : 20 %

Ujian Tengah Semester : 35%

Ujian Akhir Semester : 25%

Jakarta, 5 April 2017

Mengetahui,

Ketua Program Studi, Dosen Pengampu,

 ****

**NURHAYANI, SH, MH SRI REDJEKI SLAMET, SH, MH**